

Tata Ruang **Bangunan Pemukiman Diusulkan Vertikal**



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta membangun gedung secara vertikal. Pembangunan horizontal selama ini dinilai mengusur Ruang Terbuka Hijau secara ilegal dan legal. Hal tersebut diungkapkan Rukun Santoso dan Tubagus Arief, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, dan akademisi Tigor Moris Marpaung pada kegiatan "Roadshow Dewan Mendengar dan Menjawab" yang digelar di GOR UPT Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10).

Rukun menjelaskan banyaknya pendatang baru di Jakarta menyebabkan pembangunan infrastruktur, terutama permukiman, meningkat tajam. Akibatnya, sejumlah lahan yang bisa dijadikan Ruang Terbuka Hijau harus digusur. Oleh karena itu, pembangunan permukiman harus dibuat vertikal untuk menekan pengurangan RTH. "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mulai membuat bangunan permukiman atau pembangunan infrastruktur lainnya berbentuk vertikal. Pembangunan model ini akan menyelamatkan DKI Jakarta dari penurunan RTH," tegasnya.

Rukun menjelaskan persoalan DKI Jakarta selama ini dalam penambahan RTH ialah mahalny harga tanah di DKI Jakarta. Peralnya, pemerintah memiliki aturan harus membeli lahan sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kenyataannya, kata dia, hampir seluruh warga DKI Jakarta menjual tanah di atas harga tersebut.

Mahalny tanah ini jelas berpengaruh pada pengadaan RTH. Padahal dengan luas 65 ribu hektare, idealnya Ibu Kota memiliki RTH minimal 30 persen.

Tubagus Arif meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendesak dibuatnya peraturan daerah konsevasi Ruang Terbuka Hijau. Peraturan itu dibuat untuk menjaga agar setiap RTH tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. "Perda RTH ini perlu agar tidak ada lagi penyalahgunaan dan jual beli RTH oleh oknum tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Tubagus menambahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membekali setiap birokrat, terutama aparat kelurahan, dengan pengetahuan yang luas terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Peralnya, birokrat kelurahan menjadi petugas terdepan dalam menerapkan isi dari peraturan daerah.

Tigor Morris Marpaung menjelaskan fungsi RTH dalam konsep kota modern, yakni menciptakan ruang sosialisasi baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembuatan taman-taman kota harus menjadi prioritas utama bagi pemimpin di DKI Jakarta. "Adanya taman-taman kota yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan wajah sebuah kota modern yang pro lingkungan," jelasnya.